

Pengaruh Feminisme Barat Pada Gerakan Kesetaraan Gender Di Republik Islam Iran

Falka Haidar

Departemen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
JI Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183
Email: haidarfalka@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mencoba mendiskusikan dan mengelaborasi pengaruh feminisme Barat pada gerakan kesetaraan gender di Republik Islam Iran. Pengaruh feminisme Barat dapat dilihat dari adanya nafas dan tuntutan yang dihasilkan gerakan-gerakan kesetaraan gender seperti upaya penandatanganan Konvensi CEDAW pada era Khatami yang menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk mengakhiri diskriminasi pada perempuan. Kemudian adanya gerakan pembebasan pada era Ahmadinejad yaitu kampanye One Million Signatures yang menuntut penghapusan hukum diskriminatif terhadap perempuan dan demonstrasi besar Green Movement dengan tuntutan utama akan demokratisasi, dimana perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dan menciptakan citra damai. Terakhir adalah kampanye *My Stealthy Freedom* yang menyuarakan kebebasan berhijab. Menggunakan teori *gender mainstreaming* yang menjelaskan proses integrasi gender, penelitian ini menemukan bahwa proses *gender mainstreaming* justru dilakukan oleh gerakan-gerakan kesetaraan gender tersebut, bukan dari pemerintah. Negara gagal dalam melakukan *gender mainstreaming* mengingat banyaknya kepentingan dan singgungan antar aktor didalamnya terutama dari kelompok ulama fundamentalis

Kata kunci: Feminisme Barat, Gender Mainstreaming, Gerakan Kesetaraan Gender, Kelompok Ulama

Abstract

This paper attempts to discuss and elaborate the influence of Western feminism on gender equality movement in the Islamic Republic of Iran. The influence of Western feminism can be seen from the existence of act and demand which are produced by gender equality movements such as the efforts to sign the CEDAW Convention in the Khatami era as the evidence of the government's seriousness to end discrimination against women. Moreover, the liberation movement in Ahmadinejad era was the One Million Signatures campaign which demanded the elimination of discriminatory laws against women and a large Green Movement demonstration with the main demand for democratization, where women have an important role as the forefront and create a peaceful image. Lastly, the *My Stealthy Freedom* campaign voiced freedom to veil. Using gender mainstreaming theory that explains the process of gender integration, this study found that the gender mainstreaming process is carried out by these gender equality movements, not from the government. The state fails to uphold gender mainstreaming given the many interests and allusions between the actors therein, especially from fundamentalist clerical groups.

Keywords: Western Feminism, Gender Mainstreaming, Gender Equality Movement, Clerical Groups

PENDAHULUAN

Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin ilmu yang muncul pada akhir abad ke-19 dapat dikatakan sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengalami proses dinamisasi yang tergolong cepat (Hadiwinata, 2007). HI dimasa kini sudah tidak melulu berkuat pada pencarian *power*, kepentingan nasional, ataupun cerita-cerita *grand narratives* yang mengandalkan betapa pentingnya tampuk kepemimpinan para raja atau jendral (Wirasenjaya, 2012). Bahasan-bahasan studi HI sudah keluar jauh dan melampaui isu-isu

tersebut. Mulai dari 1983 studi HI juga sudah berbicara akan emansipasi, soal bagaimana membebaskan keterkungkungan manusia, hingga tentang bagaimana mengembangkan potensi yang ada dari tiap-tiap maunsia (HI UGM, 2019).

HI yang bicara soal pembebasan keterkungkungan pada manusia ini lebih lanjut juga menyebarkan semangat akan penyebarluasan gagasan baik itu ide atau norma untuk mengubah keadaan tersebut, agar dunia bisa memiliki pandangan utuh dan sama akan suatu masalah. Ide atau norma yang

dimaksud adalah norma kosmopolitan, suatu ide yang membahas bahwa setiap individu didunia ini tidak boleh dibatasi dan dibedakan hanya karena perbedaan-perbedaan yang ada, karena pada dasarnya setiap individu dimuka bumi ini adalah sedereajat dan sebagai bagian dari umat manusia (Maksum, 2014). Pembahasan penyebaran norma kosmopolit inilah yang menjadi awal bagaimana masalah yang dibicarakan dapat menemui pandangan yang sama dari *global civil society*. Seperti yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini yaitu soal keseragaman pandangan masyarakat dunia terhadap isu feminisme. Isu yang berkuat pada pembebasan perempuan dari ketidakadilan konstruksi dimasyarakat.

Bahasan feminisme dalam HI berhasil mengubah citra studi ini dari masa-masa sebelumnya. Dimana HI sempat didominasi oleh pandangan kaum realis yang menganggap pentingnya nilai-nilai maskulinis seperti contoh pada pentingnya keamanan negara (Robert Jackson, 2013). Menurut Nur Azizah dalam bukunya mengatakan bahwa feminisme adalah sebuah pemikiran yang mengakui adanya subordinasi yang dialami oleh perempuan, dari perilaku ini yang kemudian memunculkan suatu usaha atau jalan keluar untuk mengakhirinya (Azizah, 2017). Ani Soetjipto dalam bukunya juga menjelaskan bahwa feminisme adalah suatu gerakan politik dengan pokok bahasan utamanya adalah hak-hak perempuan dan emansipasi gender, menurutnya pula pusat dari teori ini adalah pada gender sebagai pusat dari keseluruhan analisis (Soetjipto, 2013). Melalui pandangan dari kedua penulis tersebut dengan ini dapat ditarik bahwa konstruksi gender pada perempuan yang timpang menjadi penting, karena keadaan ini terjadi diberbagai kebudayaan dunia. Dimana perempuan sering mendapatkan posisi yang tidak diuntungkan.

Posisi-posisi atau kedudukan-kedudukan yang tidak menguntungkan tersebut salah satunya dapat dilihat dari adanya doktrin soal perempuan diberbagai macam kebudayaan dunia, misalnya doktrin perempuan pada masa pendudukan Nazi di Jerman yaitu *Kinder, Kirche, Kuece* atau yang dapat diartikan dalam bahasa bahwa peran perempuan yaitu mengurus anak, gereja, dan dapur (Maria Ulfa, 2013). Hal serupa juga dapat ditemui di Indonesia dengan doktrin dapur, kasur, dan sumur (Hermawati, 2007). Demikian juga di Iran seperti dengan pernyataan Shirin Ebadi bahwa menjadi perempuan Iran adalah posisi yang sulit karena memang segala hal dibuat diskriminatif, bahkan nilai kesaksian seorang perempuan dianggap setengah dari kesaksian seorang laki-laki (Shilawati, 2013).

Ujaran atau doktrin-doktrin tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa perempuan sampai saat ini pun masih dianggap sebagai liyan bahkan *second sex* dalam

kehidupan sosial. Tak bisa dipungkiri hal-hal tersebut membuat feminisme sebagai sebuah ide baru dengan cepat dapat tersebar. Mengenai adanya kesamaan rasa yang dialami oleh perempuan karena perbedaan konstruksi sosial. Dengan ini feminisme dapat menyebar ke berbagai macam negara yang menganut berbagai paham ideologis, pun termasuk Iran sebagai negara yang dilabeli konservatif.

Jumhuri ye Islami ye Iran atau Republik Islam Iran adalah salah satu negara yang terletak dikawasan Timur Tengah. Negara dengan julukan negeri para *mullah* atau ulama. Disebut demikian karena memang nyatanya ulama memegang peranan penting dalam kehidupan bersosial dan bernegara. Kekuatan ulama di Iran dapat tercipta karena dijadikannya sistem *Velayat el-Faqeh* sebagai landasan ideologis dalam bersosial dan bernegara. Sistem ini adalah sistem yang menekankan kepemimpinan dibawah tangan para ulama, dianggap demikian karena sistem ini adalah sistem yang lahir dari sintesa ajaran Syiah Imam Kedua Belas, ajaran yang menganggap bentuk keimamahan adalah bentuk pemerintahan penerus kenabian (Usman, 2017). Dari sini kehadiran para ulama sama dengan kehadiran wakil Tuhan, maka dari itu segala sesuatu yang datang dari ulama seolah menjadi mutlak. Akibatnya ulama dapat berperan diberbagai macam bidang.

Pemerintahan para ulama tapi nyatanya tidak menjamin akan terpenuhinya hak dan keadilan pada rakyat. Ulama-ulama yang ada justru ulama yang tidak terbuka dengan pembaharuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran ulama yang justru melakukan tafsir sepihak dari teks-teks keagamaan, termasuk mengenai kehadiran dan peran perempuan (Shilawati, 2013). Dari sini awal ketimpang soal perempuan dan budaya patriarki di masyarakat tumbuh dan terbentuk. Kemudian diperkuat pula dengan posisi ulama sebagai aktor perumus kebijakan dan penentu lahirnya kebijakan, dimana memang pada nyatanya ulama laki-laki sangat mendominasi proses tersebut (Cipto, 2004). Kebiasaan akan produk kebijakan pun dimulai dari sini, bagaimana suatu kebijakan bisa memiliki keadilan jika perumusannya saja tidak mewakili suara-suara rakyat. Dan ini makin diperkuat dengan banyaknya kebijakan yang koersif, intimidatif, dan diskriminatif pada perempuan. Kebijakan yang ada justru selalu menguntungkan laki-laki. Diantaranya seperti segregasi ditempat publik berdasar jenis kelamin, kontrol seksualitas seperti pada legalisasi praktik nikah mut'ah, kemudian soal kewajiban berhijab bagi seluruh perempuan Iran apapun itu kepercayaannya, lalu pada hak asuh anak, perceraian, hingga negara yang mengizinkan praktik pernikahan anak (Bakhshizadeh, 2018) (Justice for Iran, 2014) (Shilawati, 2013). Dari sini makin terlihat bahwa adanya ketimpangan gender

di Iran juga terjadi karena negara. Septi Shilawati mengatakan dalam bukunya mengenai ketidaksetaraan perempuan di Iran justru dilegalisi oleh negara dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diskriminatif (Shilawati, 2013).

Akibat pembedan-pembedaan tersebut, tak heran jika posisi Iran selalu disudutkan terkait keadaan hak asasi manusia. Iran sering dilabeli sebagai negara pelanggar hak-hak fundamental. Menurut laporan yang disuguhkan oleh *United Nations High Commissioner for Human Rights 2018* menjelaskan dan menuntut pada Iran “untuk segera merubah dan menghapus hukum diskriminatif pada perempuan seperti pada bab pernikahan perceraian, warisan, hak asuh, hak kepemilikan paspor dan hak kewarganegaraan, serta segera meratifikasi Konvensi CEDAW untuk dapat digunakan sebagai instrumen hukum dalam menangani segala jenis pembedaan yang ada. Posisi Iran sangat disoroti komisi tinggi hak asasi manusia ini, terlebih soal adanya praktik pernikahan anak yang masih tinggi. Tidak hanya itu perilaku rezim yang diskriminatif terhadap perempuan yang tidak mengikuti syariat dan kebebasan perempuan dalam mengutarakan hak-haknya seperti pada perempuan pendukung kampanye online *My Stealthy Freedom* juga dipertanyakan, pasalnya banyak mereka yang mendukung gerakan pembebasan ini dicerna terus menerus oleh rezim, mereka bahkan sampai pada tingkatan untuk menandatangani deklarasi yang berisi untuk tidak mengikuti gerakan pembebasan tersebut dan akan patuh terhadap kewajiban berhijab dimuka umum” (United Nations High Commissioner for Human Rights, 2018).

Amnesty Internasional sebagai salah satu INGO yang fokus dalam isu hak asasi manusia juga menyatakan demikian. Menyatakan bahwa keterkungkungan yang diberitakan media-media mengenai Iran bukanlah suatu cerita fiksi, ini nyata adanya. Negara menjadi sangat ketat, abusif, dan diskriminatif. Seperti pada kasus hijab dan gaya berpakaian, dengan ini tubuh sampai menjadi urusan negara. Dan ini tegakan dengan adanya polisi moral yang senantiasa mengawasi gaya berbusana masyarakat. Polisi moral akan menangkap mereka yang tidak menggunakan hijab sesuai syariat, hingga mereka yang menggunakan *make-up* berlebih. Tidak hanya itu perilaku polisi moral juga terkenal tidak manusiawi, sudah tidak terhitung lagi bentuk-bentuk kekerasan seperti penamparan, pemukulan, hingga hukuman penjara (Amnesty International, 2019).

Pencarian identitas di negeri yang merupakan replika dari aliran teologis Syiah Imam Dua Belas ini sampai sekarang masih memiliki pergulatan yang menarik. Pertautan antara modernitas dengan nilai-nilai demokrasi yang dibawanya dan nilai-nilai Syiah masih

bergulir hingga saat ini. Jika sebelumnya Khomeini dengan pesona kharismaniknya dapat memesona masyarakat hingga kemudian merumuskan syariat Islam dan doktrin anti-Baratnya. Maka hal-hal tersebut pun bukan suatu yang absolut, dinamisasi terjadi dalam tubuh Iran. Seperti pada kasus bagaimana hubungan Barat dengan Iran hingga tumbuhnya perkembangan pemikiran di Iran, terkhususnya soal pemikiran-pemikiran feminis yang sangat dipengaruhi oleh konstelasi ideologi politik yang ada (Kamaluddin, 2011).

Perubahan konstelasi politik yang mempengaruhi perkembangan gerakan kesetaraan gender dapat dilihat salah satunya dari kepemimpinan tiap presiden. Diawali dari sosok Khatami yang dikenal sebagai ulama yang moderat, sang pembuka dan penerus perhatian terhadap pentingnya pengakuan dan hak bagi perempuan (Cipto, 2004). Dimana dalam pemerintahannya melahirkan sederet kebijakan yang mengarah pada demokratisasi Iran. Kemudian berubah total seiring naiknya Ahmadinejad yang dikenal sebagai loyalis revolusi yang sikap dan kebijakannya yang restriktif termasuk pada kelompok perempuan. Hingga munculnya hijab sebagai diskursus global yang digelorkan gerakan *My Stealthy Freedom* yang masih aktif hingga saat ini dibawah kepemimpinan Rouhani.

Suatu hal yang menarik untuk dikaji mengenai bagaimana kedudukan dan peran perempuan di Iran yang sering dibenturkan oleh konstruk syariah, dimana konstruk ini dimulai dari ulama yang kemudian ditegakan oleh negara dan dilanggengkan oleh masyarakat. Namun, nampaknya konstruk Islamis dan anti-Barat yang dibangun oleh rezim terdahulu tidak selamanya berhasil. Pergeseran-pergeseran konstelasi politik yang diikuti oleh adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender menjadi menarik untuk diteliti dan dibahas.

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan, maka kemudian penulis akan merumuskan pertanyaan ***“Bagaimana Pengaruh Feminisme Barat terhadap Gerakan Kesetaraan Gender di Iran Dari Kepemimpinan Khatami hingga Rouhani?”***

KERANGKA BERPIKIR

Peneliti memperkuat kedudukan karya tulis ini melalui suatu analisis konseptual dengan meminjam suatu teori. Adanya penggunaan teori dalam karya tulis sangatlah penting karena digunakan sebagai sebuah kaca mata dalam memandang suatu kasus atau fenomena.

- *Teori Gender Mainstreaming*

Gender mainstreaming atau yang dalam bahasa disebut dengan pengarusutamaan

gender adalah suatu istilah yang menjelaskan mengenai bagaimana peran penting integrasi gender dalam pembangunan. Istilah ini mengudara setelah diselenggarakannya *Beijing Platform for Action* pada 1995, suatu pertemuan yang menghasilkan bahasan soal pentingnya peran dan partisipasi perempuan, mengingat penghargaan terhadap keberadaan perempuan juga merupakan bagian dari penghargaan terhadap hak asasi manusia (Vijaya, 2014) (Brenner, 2009).

Pengarusutamaan gender atau yang selanjutnya disingkat PUG sering didefinisikan sebagai suatu langkah agar bagaimana gender bisa menjadi bahasan yang umum dan diintegrasikan dengan suatu pembangunan. Menurut *United Nations Development Programme* sendiri definisi PUG adalah sebagai berikut

Taking account of gender equality concerns in all policies, programmes, administrative and financial activities, and in organizational procedures, it contributes to a profound organizational transformation (Vijaya, 2014).

Dimana dapat diperjelas bahwa PUG menekankan bagaimana pentingnya kesetaraan gender disemua segi kehidupan, baik itu dalam hal kebijakan, keberlangsungan program, kegiatan administratif dan finansial, hingga prosedural untuk mencapai suatu transformasi atau perubahan.

Lebih lanjut PUG adalah salah satu aspek kunci dalam bahasan *Gender and Development*, suatu pendekatan yang menyatakan bahwa kesuksesan pembangunan tidak hanya soal bagaimana struktur ekonomi atau politik tapi juga soal bagaimana kualitas individu yang ada yang terlihat dari adanya integrasi gender didalamnya (Brenner, 2009). Berbicara soal PUG pada kenyataannya bukan berbicara mengenai hasil, PUG lebih menjelaskan suatu proses, suatu strategi, ataupun langkah untuk mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam pembangunan. Meskipun demikian namun PUG juga memiliki tujuan pada terjadinya transformasi dari ketidakadilan politik dan struktur institusional menjadi suatu keadilan yang benar-benar nyata (Vijaya, 2014).

PUG pada umumnya memang sangat identik pada negara, karena memang negara adalah aktor yang memiliki power dalam perumusan kebijakan dan pengimplementasiannya, termasuk soal kebijakan

peningkatan peran aktif perempuan diberbagai bidang. Tapi seiring dengan berkembangnya fenomena-fenomena dalam HI, peningkatan aktivisme jaringan transnasional politik juga dapat membuat aktor-aktor selain negara juga dapat membawa pengaruh eksternal dan mempengaruhi isu domestik yang berakibat pada adanya transformasi disuatu negara atau perubahan isu dari domestik yang dapat membentuk dan mempengaruhi kembali dinamika dalam HI (True & Minitrom, 2001). Berdasar ini dapat dilihat bahwa PUG tidak selamanya berpusat pada kehadiran negara semata, PUG juga bisa hadir karena adanya tekanan dari pihak-pihak selain negara.

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas bahwa rencana pengarusutamaan gender di Republik Islam Iran mulai terbuka sejak naiknya sang reformis Khatami menjadi Presiden pada 1997. Khatami dapat dianggap peneliti sebagai keran pembuka gerakan kesetaraan gender di Iran yang mempengaruhi gerakan-gerakan kesetaraan dimasa-masa sesudahnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender yang berkembang setelahnya yaitu pada era Ahmadinejad hingga Hassan Rouhani seperti pada *One Million Signature*, *Green Movement*, hingga *My Stealthy Freedom*. Dimana gerakan-gerakan ini berfokus agar bagaimana bahasan gender bisa menjadi suatu yang umum, suatu yang bisa diterima masyarakat. Terlebih agar perempuan juga bisa mendapatkan porsi yang setara dengan laki-laki. Tak hanya itu gerakan-gerakan ini juga mengarah pada tuntutan demokratisasi bagi rezim.

PEMBAHASAN

A. Diskursus Kesetaraan Gender

1. Khatami dan Proposal Penandatanganan Konvensi CEDAW

Khatami adalah tokoh yang dikenal karena keberhasilannya memikat rakyat lewat isu-isu kontroversial yang ia angkat, isu-isu yang awalnya tidak pernah dibawa dalam ranah pemilihan presiden. Isu-isu tersebut seperti demokrasi, HAM, pengakuan peran perempuan, keterbukaan, pluralisme, hingga pentingnya keterlibatan generasi muda (Cipto, 2004) (Aulawi, 2008). Dari isu-isu tersebut sudah tergambar jelas akan bagaimana nantinya Khatami akan memerintah.

Naiknya Khatami disini sesungguhnya dan sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat Iran menginginkan suatu perubahan yang nyata. Dinyatakan

juga bahwa fenomena Khatami ini adalah yang menandai akan kejenuhan rakyat terhadap dominasi kelompok agamawan, masyarakat sadar dan menginginkan adanya kebebasan dari dogmatisme *mullah* yang gagal memberi bukti kesuksesan kehidupan (Argenti, 2018) (Aulawi, 2008).

Era kepemimpinannya dapat dikatakan progresif, Khatami berusaha mewujudkan janji-janji yang ia kemukakan dimasa kampanyenya. Khatami sebagai seorang cerdas pandai juga merealisasikan ide-ide fenomenalnya soal eksistensi demokrasi, hubungan dengan Barat dan pentingnya peran perempuan. Seperti mengangkat partisipasi dari kaum perempuan dikabinet dengan dipilihnya Masoumeh Ebtekar sebagai wakil presiden, menaruh 13 perempuan dalam parlemen, membangun kabinet dengan susunan kaum reformis, menjalankan politik rekonsiliasi dengan tidak berporos selalu pada pemenuhan ideologis Iran, memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab dan Islam yang ditunjukkan lewat terpilihnya Iran sebagai tuan rumah Konferensi OKI pada 1997, lalu memperbaiki hubungan dengan negara-negara Eropa (Cipto, 2004) (Kurniadi, 2011).

Kemoderatan Khatami soal perempuan sangat membawa angin perubahan positif di Iran. Pada masa inilah kekuatan dari kelompok perempuan mulai diperhitungkan dan diperhatikan. Salah satunya adalah dengan itikad Khatami untuk mendatangi *The Convention of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau dalam bahasa disebut sebagai Konvensi Perempuan. Dari sini terlihat bagaimana Khatami memandang Barat, bahwa tidak selamanya nilai-nilai Barat itu buruk, terlebih mengenai pembahasan soal kedudukan perempuan. Awal mula niatan ini ada ketika pada tanggal 23-28 Februari 1997 pemerintah Iran mengundang Komite CEDAW untuk pertama kalinya, pemerintah Iran meminta Komite CEDAW untuk berbicara didepan Asosiasi Solidaritas Perempuan Iran tentang Konvensi Perempuan, bagaimana peran Komite CEDAW, hingga soal apa yang harus dilakukan negara ketika menjadi peserta konvensi, hal inilah yang menjadi sinyal positif akan niat Iran sebagai pihak yang nantinya akan menandatangani konvensi ini (Shilawati, 2013).

Namun niat baik untuk menjadi penandatanganan konvensi ini yang sudah melalui pembahasan panjang mulai dari kabinet hingga parlemen yang telah menyetujuinya justru ditolak oleh Dewan Perwalian atau *Guardian Council*, dengan alasan sebagai produk Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Shilawati, 2013). Usaha ratifikasi CEDAW ini diteruskan dilakukan hingga termin kedua pemerintah Khatami, diteruskan kedua ini parlemen bahkan menambahkan prasyarat kondisi ketika nantinya Iran

meratifikasi CEDAW seperti Iran hanya menerima prinsip-prinsip CEDAW yang sesuai dengan nafas Islam dan pengadilan internasional tidak bisa melakukan urusan intervensi terhadap urusan dalam negeri Iran (Bakhshizadeh, 2018). Realisasi dari rencana ini pun sampai sekarang tidak ada progres, niatan akan penandatanganan Konvensi CEDAW ini pada praktiknya memang terganjal oleh kuatnya peran Dewan Garda atau *Guardian Council*, dewan yang didominasi ulama fundamentalis dan menjadi salah satu basis kekuatan kelompok ulama.

Perubahan paling mengemuka pada era Khatami yang paling disoroti dalam penelitian ini adalah upaya pengajuan proposal untuk penandatanganan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) atau Konvensi Perempuan. Suatu konvensi yang dibuat dengan tujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan akses yang seadil-adilnya bagi perempuan. Dari sini negara sebagai aktor legal-formal yang memiliki kekuatan hukum dan kedaulatan, dituntut untuk bisa menghapuskan perlakuan tersebut dengan meratifikasi konvensi ini. Seperti sifat-sifat perjanjian internasional yaitu *pacta sunt servanda* yang artinya perjanjian ini meningkat dan mengharuskan negara tunduk pada apa yang telah disepakati. Disini terdapat inti, bahwa jika negara meratifikasi konvensi ini maka negara tersebut harus bisa memainkan peranannya dengan memasukan dan menuangkan isi perjanjian yang ada pada hukum yang tertulis.

Konvensi Perempuan adalah konvensi yang dianggap sebagai konvensi dengan mekanisme yang jelas dan komprehensif, dimana didalamnya tertuang dengan jelas definisi-definisi dan batasan yang ada mengenai status dan hak perempuan juga soal diskriminasi itu sendiri. Seperti contohnya tercantum jelas dalam pasal 1 yang menjelaskan mengenai definisi dari diskriminasi, bahwa yang disebut dengan diskriminasi yaitu ketika terjadi pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang ada dan dibuat berdasar jenis kelamin, dan hal-hal tersebut mempunyai tujuan untuk mempengaruhi, mengurangi, merampas pengakuan atas hak asasi manusia (UN Women National Committee Australia). Konvensi ini memberikan peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat dan terpenuhi hak-hak fundamentalnya baik itu pada bidang politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, hukum, pernikahan, hingga hubungan dalam keluarga (Shilawati, 2013).

Hadir dengan tujuan mulia untuk memberikan keadilan pada perempuan soal hak yang dimilikinya dan posisinya yang juga menjadi subjek hak asasi manusia, membuat konvensi ini menjadi konvensi yang memiliki sifat khusus pada pemenuhan status dan hak perempuan. Pemenuhan tersebut dapat terlihat dari

adanya praktik *affirmative action* atau perlakuan khusus sementara dalam perjanjian ini yang dimandatkan pada aktor negara. Praktik ini dilakukan mengacu pada masih tertinggalnya kondisi perempuan diberbagai belahan dunia, dari sini perlu kemudian adanya perlakuan khusus sementara yang diberikan negara demi mengejar ketertinggalan yang dialami kaum perempuan dengan cara seperti yang terdapat dalam pasal 5 yaitu mengubah konstruk tingkah laku sosial budaya baik pada laki-laki dan perempuan untuk penghapusan prasangka-prasangka, atau praktik yang menjurus ke stereotip atau inferioritas atau superioritas dan menjamin pendidikan keluarga yang tepat bahwa berkeluarga adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan (Shilawati, 2013).

Kondisi ketika negara sudah melakukan penandatanganan terhadap perjanjian internasional yaitu harus tunduk terhadap apa yang telah disepakati ini yang membuat peneliti menilai bahwa Khatami memiliki keinginan untuk menghentikan praktik pembedaan yang ada pada perempuan melalui adanya penandatanganan Konvensi CEDAW yang dapat dijadikan sebagai kerangka hukum nantinya. Lebih dari pada itu pentingnya penandatanganan terhadap konvensi ini juga mempunyai tujuan untuk mengurangi dan meniadakan pandangan-pandangan negatif yang sering ditujukan kepada Iran, negara yang dianggap sering melanggar hak-hak perempuan (Shilawati, 2013). Adanya ratifikasi terhadap Konvensi CEDAW adalah langkah awal untuk mengakhiri ketimpangan yang selama ini ada.

Masa-masa kepemimpinan Khatami selama dua periode dengan ide-ide yang revolusioner ini yang kemudian dianggap sebagai masa tumbuh suburnya peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan di Iran (Prayugo, 2005). Khatami melakukan perubahan yang besar hingga menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan janji-janjinya. Namun lagi, pemerintahannya selalu diganjal akan kuatnya ulama konservatif yang membuat program-program Khatami tidak semuanya menjadi berhasil bahkan Khatami dianggap lumpuh dalam menjalankan periode kedua kepemimpinannya (Cipto, 2004). Sekaligus ditahun-tahun Khatami berkuasa ini pula menjadi menguatnya polarisasi kubu di Iran, dengan reformis yang menginginkan perubahan yang dihadapkan dengan kelompok ulama yang menganggap dirinya sebagai penjaga revolusi suci. Masa-masa Khatami dianggap sebagai peretemuan antara tradisi dan modernitas, implementasi demokrasi dengan dijalankannya teokrasi, hingga eksistensi antara hak asasi manusia dan hukum religi (Ridho, 2016). Pada masa ini juga menjadi awal dari kehadiran perempuan yang mulai diperhatikan dan

diperhitungkan dalam kehidupan sosial dan politik di Iran.

Keinginan mengenai adanya wacana kesetaraan gender di Iran sesungguhnya sudah terlihat dari naiknya Khatami sebagai presiden Iran, sosok yang digadang-gadang mampu membawa angin segar terhadap perubahan Iran menuju ke arah yang lebih demokratis. Khatami adalah orang yang dianggap mampu mendengar isu-isu yang rakyat inginkan seperti kebebasan, pengakuan hak pada perempuan, hingga demokratisasi Iran. Melalui pemikirannya yang revolusioner dan tidak anti terhadap suatu paham, Khatami sebagai seorang presiden berusaha mengupayakan adanya suatu perubahan dari ide-ide sinkratisnya. Perubahan yang terjadi pada kepemimpinannya dimotori oleh semangat dirinya sendiri dalam melihat realitas yang ada. Khatami dalam konteks sebagai presiden mampu menggunakan posisinya yang istimewa yang untuk memberikan dan mengembangkan norma baru di Iran yaitu demokrasi. Ia sebagai motor perubahan memiliki caranya tersendiri dalam menciptakan dan mempengaruhi masyarakat Iran untuk menumbuhkan benih-benih demokrasi.. Dari sini kemudian Khatami sering dijuluki sebagai pejuang demokrasi Iran (Aulawi, 2008).

Khatami dengan segenap pemikirannya juga kemudian berusaha bertindak untuk mengurangi ketegangan antara Iran dengan dunia Barat, terlebih mengingat posisi Iran yang sangat sering tidak diuntungkan dalam hubungan antarnegara. Iran sering dituduh sebagai negeri Islam yang kolot, gudang para teroris bahkan pelanggaran hak asasi manusia terkhusus bagi perempuan. Upaya perubahan diantaranya dengan dialog peradaban dan upaya ratifikasi Konvensi CEDAW. Tujuan utama dari adanya perubahan-perubahan yang ia gagas adalah jelas untuk mengurangi dan mengkonfrontir pandangan buruk dunia mengenai Iran, untuk mengembalikan lagi nama besar Iran didunia internasional, serta agar Iran dapat memainkan peranannya dalam berbagai peristiwa internasional.

Masa pemerintahan Khatami dilihat peneliti sebagai awal bagaimana wacana kesetaraan gender itu ada dan ingin diwujudkan. Menjadi pembahasan yang spesial kemudian, karena keinginan akan perubahan digerakan oleh orang-orang yang bercokol dalam pemerintahan itu sendiri yang memiliki pandangan reformis, meskipun pada akhirnya akan dihadapkan dan dihadapkan pada kekuatan kelompok ulama. Khatami sebagai orang nomor dua di Iran dianggap mampu menggunakan posisinya dengan baik untuk menciptakan iklim perubahan demokrasi di Iran seperti pada kedudukan dan hak perempuan yaitu pada pengakuan pentingnya peran perempuan, dimasukkannya perempuan dalam susunan kabinetnya,

hingga niat baik untuk meratifikasi Konvensi CEDAW. Dari sini pula yang kemudian menjadi awal keran pembuka yang dianggap peneliti mempengaruhi gerakan-gerakan kesetaraan gender dimasa sesudah kepemimpinannya.

B. PENINGKATAN AKTIVISME GERAKAN KESETARAAN GENDER

1. Ahmadinejad, Kampanye *One Million Signatures*, dan Demonstrasi *Green Movement* Kepemimpinannya Ahmadinejad dikenal ketat, dimana kondisi perempuan mengalami pembatasan kembali baik pada bidang sosial politik, berbusana, kebebasan, kegiatan advokasi, aktivitas akademik hingga bidang ekonomi (Shofiyah, 2019). Selama dua periode menjabat sebagai seorang presiden, Ahmadinejad melakukan restriksi-restriksi kembali pada semua wargenagara tak terkecuali dengan kedudukan dan hak perempuan.

Ahmadinejad menghasilkan berbagai kebijakan diantaranya seperti larangan pada hal-hal yang berbau barat seperti musik, radio, televisi, dan film, kemudian pada Oktober 2006 ia menyeru perempuan untuk kembali ke rumah untuk mencurahkan tanggungjawab dalam membesarkan anak, melakukan operasi keamanan dengan menempatkan polisi-polisi moral yang bertugas menjaga syariah agar tetap berjalan dan salah satu target dari operasi ini pada gaya berpakaian baik pada laki-laki maupun perempuan, operasi ini menangkap sekitar 150.000 orang (Shofiyah, 2019). Tidak berhenti sampai disini, seperti yang sudah disebutkan dalam paragraf sebelumnya kebebasan berkespersi pun juga mendapati perilaku demikian, pemerintah mengawasi gerak-gerik masyarakat, melakukan pengawasan dan pemfilteran terhadap media sosial, membredel jurnal dan koran yang kontra terhadap pemerintah, menutup NGO atau kelompok-kelompok yang berafiliasi pada isu kesetaraan gender, menangkap aktivis-aktivis pegiat HAM (Bakhshizadeh, 2018).

Gaya pemerintahannya yang sangat berbanding terbalik dengan rezim-rezim sebelumnya yaitu Khatami dan Rafsanjani ini kemudian menghasilkan aksi-aksi protes yang fenomenal. Aksi-aksi ini lebih lanjut bahkan dipelopori oleh perempuan-perempuan yang menginginkan kebebasan dan keadilan dari hak yang seharusnya ia miliki sebagai warganegara. Diantaranya adalah *One Million Signatures dan Green Movement*. *One Million Signatures Campaign* atau dalam bahasa “Kampanye Satu Juta Kutip Tandatangan” adalah salah satu kampanye kesetaraan gender yang berasal dari Iran dan telah mendapatkan atensi dari dunia internasional. Kampanye ini sesuai dengan namanya memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan satu juta

kutip tanda tangan sebagai alat untuk melawan hukum diskriminatif yang diterapkan oleh negara pada perempuan (Bakhshizadeh, 2018).

One Million Signatures dalam mewujudkan tujuannya untuk mengumpulkan satu juta tanda tangan sesungguhnya juga memiliki maksud lain, seperti meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan dampak kebijakan yang diskriminatif, mendorong masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender, mempromosikan kolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan suatu perubahan sosial, memberikan wadah bersuara untuk kaum perempuan, memperkenalkan masyarakat akan demokrasi yang mendukung kebebasan (Sedighi, 2009) (Bakhshizadeh, 2018). Kampanye ini ingin memberikan konstruksi pada masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender bagi masyarakat Iran, akan pentingnya penghargaan terhadap perempuan juga merupakan bagian dari warganegara dan objek dari hak asasi manusia.

Layaknya kampanye-kampanye lain kampanye ini juga memiliki cara dalam menggulirkan tuntutan. Kampanye ini memiliki dua cara yaitu lewat tatap muka dan pemanfaatan jaringan siber. Melalui tatap muka dan dialog, dimana kampanye ini hadir ditengah-tengah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, mereka mendatangi dari rumah ke rumah, mendatangi tempat-tempat dimana perempuan biasanya berkumpul, mereka melakukan tujuan lainnya yaitu untuk menumbuhkan orang-orang yang simpatik terhadap isu gender tidak hanya pemenuhan target tanda tangan semata (Voanews.com, 2009).

Melalui jaringan siber dengan dibuatnya web *change4equality.com* yang semakin berkembang menjadi 3 website lain dan memiliki website-website di tiap negara yang terdapat diaspora masyarakat Iran (Sedighi, 2009). Mengingat internet adalah cara alternatif yang bisa digunakan walau masih ada kemungkinan pengawasan dari rezim, regulasi di Iran sendiri sejak Revolusi 1979 sangatlah ketat dimana pemerintah membatasi setiap pergerakan dari tiap kelompok atau organisasi yang ada, termasuk kegiatan-kegiatan seperti kampanye atau pertemuan hanya bisa digelar oleh lembaga yang diakui dan mendapat izin pemerintah, akibatnya gerakan-gerakan yang tidak berafiliasi atau menentang pemerintah harus menjalankan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi seperti kampanye ini yang menggunakan rumah-rumah anggota berkumpul dan berkoordinasi (Voanews.com, 2009).

Kampanye ini sangat berbeda dengan kampanye-kampanye lain yang biasanya berafiliasi pada suatu ideologi tertentu, kampanye ini justru hanya berfokus pada pemenuhan tuntutan utama mereka yaitu penghapusan hukum diskriminatif pada perempuan. Kampanye yang lahir dari adanya pertemuan pasca aksi

brutal pemerintah pada demonstrasi 12 Juni 2006 yang menentang adanya hukum diskriminatif pada perempuan ini memiliki 3 pedoman dalam menjalankan kegiatannya yaitu *Statement of Campaign*, dimana mereka mengumpulkan tanda tangan sebagai sumber untuk melawan rezim dan memperlihatkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran akan gender, lalu *The Plan Of Campaign*, tahapan ini adalah soal penjelasan dari kampanye ini meliputi tujuan dan target, dan terakhir adalah *The Impact of Law in Women Lives*, pada bagian ini aktivis dari kampanye bekerjasama dengan ahli hukum untuk membuat draft hukum yang baru dengan harapan dapat menggantikan hukum yang diskriminatif (Sedighi, 2009) (Sameh, 2014). Tuntutan-tuntutan kampanye ini diantaranya

1. Undang-undang perkawinan, dimana walau sudah ditetapkan usia minimum pernikahan tetapi pernikahan tetap bisa berlangsung ketika wali mengizinkan
2. Hak kewarganegaraan pada perempuan, yaitu kewarganegaraan perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Kewarganegaraan pada perempuan tidak dapat menurun pada anaknya, artinya walau memiliki ibu warganegara Iran tapi belum tentu anak tersebut menjadi warganegara Iran
3. Perceraian, pada praktik ini laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Dibuktikan dengan undang-undang bahwa laki-laki dapat dengan mudah menceraikan istrinya kapanpun yang ia inginkan, sedang perempuan ketika ingin menggugat cerai harus bisa membuktikan akan kelakuan buruk suaminya pada pengadilan
4. Usia pidana, kampanye ini menuntut usia pidana yang terlalu muda yaitu 8 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Dengan hanya satu kondisi pengecualian yaitu ketika anak tersebut mendapat kasus eksekusi maka eksekusinya akan ditunda hingga ia berumur 18 tahun. Artinya ketika ada anak dengan batas minimum tersebut melakukan kesalahan maka dia akan dihukum dan diperlakukan layaknya orang dewasa
5. *Blood money* atau uang darah, sejenis dengan uang yang diberikan ketika seorang melakukan kesalahan atau bahkan pembunuhan. Sejenis uang

yang dapat diterima ketika menjadi korban. Pada praktik ini hak yang seharusnya diterima oleh perempuan lebih rendah dari pada yang diterima oleh laki-laki. Porsi perempuan untuk mendapatkan haknya adalah setengah dari porsi laki-laki

6. Warisan, tuntutan yang ada pada pemberian warisan pada anak laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari pada anak perempuan dan pemberian warisan pada seorang istri ketika ayah atau suaminya meninggal
7. Poligami, negara yang memberikan kebijakan bahwa laki-laki berhak menikah seorang perempuan perempuan sebanyak 4 kali dan memiliki kebebasan dalam melakukan nikah mutah atau kawin kontrak
8. Hak bersaksi, perempuan dalam ini dibatasi dalam sejumlah bahasan seperti homoseksualitas, prostitusi, dan sodomi. Dalam haknya sebagai saksi bahkan suara seorang perempuan hanya dinilai dari setengah dari suara seorang lelaki (Sedighi, 2009).

Kampanye ini sendiri adalah kampanye yang strukturalis, dimana memandang perlu adanya perubahan dari struktur dan hirarki yang ada (Sameh, 2014). Seperti yang sudah kita ketahui dari bahasan-bahasan sebelumnya soal bagaimana peran pemerintah terutama soal kuatnya kelompok ulama yang ada dan adanya hukum diskriminatif yang ada yang membuktikan bahwa perempuan adalah warganegara kelas dua. Dari catatan majalah *Glamour* disebut bahwa kampanye ini menjadi ancaman serius rezim, bunyi catatannya sebagai berikut

“Iran’s religious, conservative government sees the campaign as a real threat. Authorities have arrested more than 50 campaign members, who have been punished with everything from lashing to solitary confinement in prison. The group’s website has been shut down by the government 21 times. Members hold clandestine meetings in living rooms and basements, and activists say they are under constant surveillance and subject to phone taps. (RadioFreeEuropeRadioLiberty, 2009)”

Dari catatan tersebut sekaligus dapat terlihat akan kampanye ini bekerja, bahwa aktivisme kelompok penggiat kesetaraan gender pun mengalami hal yang sama dimana banyak dari mereka yang harus menerima konsekuensi berupa sanksi atau bahkan tahanan. Mereka ditangkap dengan tuduhan melakukan

propaganda terhadap rezim, meracuni pandangan masyarakat, hingga membahayakan ideologi nasional (Bakhshizadeh, 2018).

Dibalik ketatnya pengawasan rezim yang ada namun gerakan ini terus berjalan dan menghasilkan perkembangan yang signifikan. Kampanye yang dimulai pada 27 Agustus 2006 ini, dalam kurun waktu 2 tahun sudah bisa memperluas jaringannya ke 20 kota di 13 provinsi di Iran, di luar Iran kampanye ini juga mampu menyebar ke 7 negara di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Amerika yang disebabkan oleh diaspora masyarakat Iran disana (Sedighi, 2009). Menjadi bukti bahwa gerakan kesadaran akan kesetaraan gender juga memiliki tempat dihati masyarakat Iran. Terlebih soal bagaimana perempuan yang memiliki sejarah yang panjang dalam proses sejarah Iran. Kesuksesan lain adalah gerakan ini mendapat banyak atensi dari masyarakat internasional seperti dengan mendapat penghargaan diantaranya *the Olof Palm Prize* tahun 2007, *the National Endowment for Democracy Award* tahun 2008, *Simone de Beauvoir Award* tahun 2009, *the Global Women's Right by Feminist Majority Foundation* tahun 2009 (Sedighi, 2009). Tidak hanya dari dunia luar, bahkan kampanye ini pun mendapat dukungan yang tidak diduga, ulama yang biasanya sangat kontra pada gerakan kesetaraan gender justru malah memberikan dukungan, dialah Ayatollah Sane'i yang makin menambah aktivisi-aktivis pada kampanye ini semakin yakin akan hak yang dituntutnya (Sedighi, 2009).

Thesis yang ditulis oleh Gilda Sedighi yang mana ia melakukan observasi langsung di Iran, ia menyatakan bahwa gerakan kampanye ini adalah gerakan yang dibuat asli dari masyarakat Iran karena dapat dilihat dari konteks gerakan dan aksi-aksi yang ada (Sedighi, 2009). Artinya dengan ini *One Million Signatures* adalah *local movement* yang kehadirannya berdiri sendiri.

Kesuksesan dari kampanye ini juga dapat dilihat dari keberhasilan *lobbying* yang dilakukan bersama gerakan-gerakan perempuan lain dengan parlemen dan kelompok ulama untuk menghapuskan pasal yang merestriksi status perempuan yaitu pasal 23 yang berisikan laki-laki boleh menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya dan pasal 25 tentang dikenakannya pajak pada mahar perempuan dalam pengajuan *Family Bill* ditahun 2007, hingga akhirnya rancangan tersebut disepakati parlemen pada tahun 2013 dengan penghilangan dua pasal tersebut (Bakhshizadeh, 2018).

Aksi protes lain yang terekam selama kepemimpinan dua periode berturut-turut Ahmadinejad adalah demonstrasi besar-besaran ditahun 2009. Dimana demonstrasi ini terjadi karena kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan

presiden 2009 yang menghasilkan kemenangan Ahmadinejad dengan suara sebanyak 62% mengalahkan kandidat reformis yang digadang-gadang menang yaitu Mir Hossein Mousavi yang hanya mendapat 34% (Yuliani, 2010). Suatu demonstrasi yang terjadi dan berawal dari jalanan-jalanan di kota Tehran dan menyebar massif keseluruh Iran, bahkan dianggap sebagai perpecahan terbesar di Iran setelah adanya Revolusi 1979.

Pemilihan presiden pada tahun tersebut merupakan pemilihan yang panas, dapat dibuktikan dari demonstrasi yang makin membesar terkait kemenangan Ahmadinejad yang menghasilkan perdebatan seperti protes Mousavi akan 14 juta surat suara yang hilang, hingga dugaan bahwa Ahmadinejad dibantu oleh golongan ulama fundamentalis untuk mengalahkan kandidat reformis Mousavi (Reza, 2017) (Yuliani, 2010). Dari kekecewaan-kekecewaan tersebut kemudian muncul suatu aksi kolektif demonstrasi dari masyarakat Iran sekaligus dukungan dari diaspora warganegara Iran diluar negeri seperti di Eropa, Amerika, dan Australia yang masih memiliki jaringan dan peranan yang kuat (Bajoghli, 2016). Suatu aksi demonstrasi untuk menentang kemenangan Ahmadinejad, lebih jelas aksi demonstrasi ini kemudian dikenal dengan istilah *Green Movement*. Peristiwa demokratisasi yang lebih dahulu muncul ketimbang *Arab Spring* yang terjadi pada 2010. Nama *Green Movement* sendiri didapat karena aksi ini digawangi oleh para pemuda yang lahir dari generasi pasca revolusi (Reza, 2017).

Green Movement adalah gerakan yang memiliki focus yaitu pemenuhan-pemenuhan terhadap prinsip demokrasi. Tuntutan-tuntutannya seperti pada kebebasan dan penghargaan HAM dalam prinsip demokrasi seperti penghitungan suara ulang, kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan, menjunjung supermasi hukum, pemisahan agama dengan politik, kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap minoritas (Birgani, 2010) (Reza, 2017). Demonstrasi ini juga didukung penuh oleh ekspatriat Iran yang bermukim di Eropa dan Amerika Serikat (Sams, 2019).

Menjadi hal yang unik karena demokrasi adalah tuntutan utama, suatu perlawanan terhadap tirani rezim yang diharap dapat menimbulkan perubahan. Baik itu golongan sekuler maupun golongan Islam dalam gerakan ini dapat menyatukan pandangannya yaitu mengarah pada pemenuhan prinsip demokrasi. Dari tuntutan dan kelompok-kelompok didalamnya sudah dapat terlihat dengan jelas bahwa gerakan ini adalah gerakan yang berasal dari aspirasi masyarakat Iran sekaligus bukti akan ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim yang ada.

Pada bahasan sebelumnya sudah disinggung bahwa apa-apa yang menyinggung atau mendelegitimasi rezim pasti akan berujung dan berhadapan terhadap rezim baik itu tindakan represif, hukuman atau sanksi, hingga pembunuhan dan pengasingan. Gerakan ini pun demikian, mengalami nasib yang sama. Salah satunya dengan ditembaknya Nedha Agha Soltan oleh aparat, meninggalnya Nedha ini mendapat perhatian dari dunia internasional sekaligus menjadikan dirinya sebagai symbol terhadap gerakan anti-pemerintah (Fathi, 2009). *Green Movement* sebagai gerakan demonstrasi yang lahir karena kekecewaan terhadap hasil pemilu ini dapat sekaligus dijadikan bukti bahwa peristiwa politik domestik seperti pemilihan presiden pun dapat berubah dan mempengaruhi konteks politik regional (Dabashi, 2013). Satu hal yang menjadi makin menarik dari gerakan ini adalah turut terlibat aktifnya peran perempuan didalamnya. Berbicara akan fakta bahwa eksistensi perempuan dan perjuangan demonstrasi adalah hal yang nyata terekam dalam sejarah Iran dan memang tidak bisa dipisahkan.

Peran perempuan dalam demonstrasi ini sangatlah besar, kehadiran seperti yang dijelaskan dalam tulisan Victoria Tahmasebi Birgani bahwa pada peristiwa ini perempuan dari segala lapisan masyarakat Iran turun tangan, baik dari mereka yang religius, non-religius, sekuler, semua ada dan terlibat dalam proses ini, mereka terlibat dalam long-march, berorasi, menyorkan dan menyanyikan kata-kata perlawanan terhadap rezim, membawa spanduk-spanduk menantang rezim, hingga menentang aparat-aparat keamanan. Perempuan sangat memegang peranan kunci berjalannya aksi karena perempuan adalah garda terdepan dalam demonstrasi yang bahkan partisipasinya melebihi partisipasi laki-laki, lebih dari itu bahkan kehadiran perempuan menjadi *buffer* atau penyangga diantara demonstran laki-laki dan aparat keamanan, dengan ini kehadiran dan peran besar perempuan dalam gerakan ini bahkan berhasil mengubah nafas dan citra gerakan menjadi suatu gerakan demonstrasi yang damai, anti terhadap kekerasan (Birgani, 2010). Besarnya perempuan dan perannya dalam gerakan ini dapat menjadikan bukti bahwa pemikiran terhadap prinsip-prinsip feminis telah merasuk dan tersebar di Iran.

2. Hassan Rouhani dan Kampanye Kebebasan Hijab *My Stealthy Freedom*

Hassan Rouhani dikenal sebagai sosok presiden dianggap lebih moderat dan dikenal dekat dengan kaum muda sampai dianggap menjadi suara kaum muda, selain itu ia dikatakan sebagai seorang yang tidak terlalu setuju dengan hukum yang ketat (Mahmood, 2016).

Pembawaan yang demikian juga ia tuangkan dalam janji-janji kampanye yang ia bawakan, ia menyampaikan keinginan-keinginannya untuk melakukan perubahan terhadap Iran dari mulai dari janjinya berupa pembuatan piagam hak-hak sipil karena fakta lemahnya hak sipil pada masyarakat Iran terutama pada masa pemerintahan Ahmadinejad yang banyak menjadi korban, pemulihan kondisi perekonomian Iran yang lemah akibat embargo-embargo yang diberlakukan, hingga perbaikan hubungan dengan negara-negara Barat (Mikail, 2013).

Kepemimpinannya ia usahkan dengan mewujudkan janji-janjinya, dimana kesuksesan yang dapat diperhitungkan salah satunya adalah terciptanya perjanjian JCPOA. Dibawah Rouhani pula aturan-aturan syariah yang ada di Iran mulai dikendurkan lagi seperti di era Khatami. Salah satu contohnya adalah sedikit lunaknya aturan soal hukum menggunakan hijab dimana tidak selalu perempuan-perempuan ditangkap karena penggunaan hijab yang tidak sesuai, hingga adanya kesempatan perempuan untuk bisa melakukan aksi-aksi perlawanan (Mackintosh, 2018). Meskipun apa yang dikatakan atau diinginkan Rouhani ini tidak dapat berjalan sepenuhnya karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa peran ulama masih menjadi dominan dan politik di Iran.

Isu hijab menjadi salah satu isu mengudara dibawah kepemimpinan Rouhani hingga sampai membawa hijab pada diskursus global karena meningkatnya aktivisme gerakan kebebasan berhijab yaitu *My Stealthy Freedom* yang menuntut adanya kebebasan berhijab bagi perempuan. Gerakan yang berawal dari adanya kampanye di media sosial Facebook, yang juga disebut-sebut sebagai gerakan demokratisasi online penerus gerakan demokratisasi offline sebelumnya yang mengudara pada tahun 2009 yaitu peristiwa *Green Movement* (Koo, 2016).

Suatu kampanye online yang menuntut kebebasan berkepresian yaitu dalam penggunaan hijab, dimana fokus kampanye ini menyuarakan bahwa hijab adalah sesuatu yang berasal dari ketulusan bukan ada karena paksaan dari aturan yang dibuat pemerintah. Kampanye online yang kini memiliki jumlah sebanyak 1.042.820 pengikut dalam laman *Facebook*, yang didirikan oleh seorang jurnalis Iran bernama Masih Alinejad. Alinejad adalah salah satu diantaranya banyaknya jurnalis Iran yang terlibat dalam aksi demonstrasi *Green Movement* 2009 dan memilih pergi meninggalkan Iran karena pilihan yang diberikan pemerintah dari tindakan-tindakan kritisnya pada tahun 2009 yaitu meninggalkan Iran atau hidup dipenjara (Company, 2018).

My Stealthy Freedom adalah kampanye online yang memang berasal dari Iran dan menuntut tentang

keadaan di Iran pula, tapi kampanye ini lebih dari pada itu. Kampanye ini berhasil menarik perhatian masyarakat dunia dengan aktivisme-aktivisme dan caranya mengemas isu yang dijelaskannya. Suatu kampanye yang tadinya hanya berada pada media sosial namun kini berhasil mempengaruhi pola pikir masyarakat Iran maupun dunia menjadi gerakan pembebasan yang nyata. Gerakan yang tadinya hanya berasal dari adanya unduhan foto Alinejad yang menunjukkan rambut indah dan mengatakan keinginannya untuk bebas menikmati udara segar yang kemudian menuai banyak dukungan dari perempuan-perempuan Iran, hingga akhirnya Alinejad berinisiatif untuk membuat suatu platform yang tujuannya menjadi wadah bagi perempuan Iran untuk menunjukkan pada bagaimana kondisi Iran sebenarnya, menjadi tempat bertukar pikir ide yang kemudian diberi nama *My Stealthy Freedom* (Suzanne & Eliora, 2019). Sesuai dengan namanya *My Stealthy Freedom* yang jika diartikan dalam bahasa adalah kebebasanku secara diam-diam adalah platform yang dibuat sebagai wadah perempuan Iran untuk menunjukkan kebebasannya, meski hanya berupa mengirim foto tanpa hijab dengan tidak menunjukkan wajah (Aengenvoort, 2014).

Kampanye ini pada praktiknya mengajak dan mendorong perempuan-perempuan Iran dan masyarakat dunia untuk memprotes kebijakan hijab melalui ajakan mengirimkan foto dalam laman facebook *My Stealthy Freedom*. Bahasan kunci pada kampanye ini adalah pada penolakan terhadap kewajiban berhijab tapi seiring dinamisasi didalamnya *My Stealthy Freedom* juga menyuarakan kesetaraan gender hingga pemenuhan dasar terhadap hak asasi manusia seperti pada kasus larangan perempuan untuk masuk ke stadion, izin berpergian ke luar negeri yang harus mendapat persetujuan pada suami atau wali, hingga pada titik perjuangan untuk menyuarakan suara perempuan yang masih dianggap haram diranah publik (Koo, 2016).

Gerakan yang awalnya berbasis pada media sosial ini menelurkan kampanye-kampanyenya pada penggunaan tagar untuk menarik perhatian masyarakat dan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam aksi ini. Tagar-tagar yang ada seperti #WhiteWednesday #MenInHijab #SeeYouIranWithoutHijab.

Tagar #WhiteWednesday adalah tagar yang dibuat Alinejad untuk menarik masyarakat agar ikut dalam aksi penolakan terhadap hijab dengan mengajak baik perempuan maupun laki-laki untuk mengenakan pakaian putih setiap Rabu (Hatam, 2017). Tagar ini adalah tagar yang masih aktif sampai dengan sekarang. Aksi rutin ini bahkan menjadi simbol dari kampanye *My Stealthy Freedom*. Selain bertujuan untuk mengajak orang menolak aturan hijab, tagar ini juga memiliki

tujuan lain untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat pada aktivis-aktivis gender yang ditahan dalam memperjuangkan kebebasan berhijab (Bakar, 2019).

Tagar WhiteWednesday yang dibuat oleh Alinejad ini juga mempunyai tujuan untuk mengajak masyarakat untuk agar bisa melakukan aksi perlawanannya secara langsung diranah publik dengan simbol pakaian putih tersebut (Bakar, 2019). Alinejad mendorong perempuan untuk berani tampil mengutarakan tuntutan mereka diruang publik sekaligus untuk tetap menjaga eksistensi gerakan yang ia buat. Aksi yang terpengaruh dari kampanye ini seperti pada kasus Vida Movahed pada tahun 2017, dimana ia berdiri di *Tehran's Enqelab Street* dengan melilitkan hijabnya pada kain dan mengibarkannya seperti bendera yang mengakibatkan dirinya kemudian ditangkap, aksi yang kemudian menjadi inspirasi perempuan-perempuan lain untuk melakukan hal yang sama dan menyebar ke 80 kota di Iran, hingga berakibat ditangkapnya 29 perempuan yang dituduh sebagai dalang aksi protes. (Suzanne & Eliora, 2019)

Kemudian juga pada aksi dibentangkannya kain putih panjang di Kedutaan Besar Iran di London yang mendapat dukungan dari direktur *The International Observatory of Human Rights* (IOHR) yang mengatakan "*we are at an ultimate tipping point of human rights in Iran*" (Bakar, 2019). Serta aksi-aksi lain yang masih dapat dilihat ketika kita melakukan pencarian dengan tagar tersebut. Tagar ini berkembang dan juga diikuti oleh perempuan-perempuan dari luar Iran seperti diantaranya dari Arab Saudi, negara-negara di Eropa, juga Amerika Serikat (Hatam, 2017).

Tagar lain yang sempat mengudara adalah #MenInHijab yang mengudara pada bulan Juli dan Agustus 2016, tagar ini juga mengajak agar kaum laki-laki agar ikut serta dalam solidaritas perlawanan terhadap kebijakan kewajiban penggunaan hijab dengan cara menggunakan hijab sebagai bentuk perlawanan (Koo, 2016). Alasan mengapa Alinejad juga mengikut sertakan peran laki-laki agar laki-laki juga bisa merasakan bagaimana rasanya mengenakan sesuatu yang dipaksa negara (McMahon & Mackander, 2016). Hal penting lain karena masih kuatnya budaya patriarkal yang menyuguhkan posisi laki-laki masih menjadi nomor pertama dalam kehidupan di Iran baik sosial maupun politik. Seperti yang dilansir dari Independent yang mengatakan "*in our society, a women's existence and identity is justified by a man's integrity, and many cases the teaching of religious authority or government official influence a man's misguided sense of ownership over women.*" (Saul, 2016)" Dari posisi ini yang membuat Alinejad juga membutuhkan peran laki-laki untuk bergabung dan menyuarakan tuntutan pembebasan.

Tagar lain berupa #SeeYouIranWithoutHijab adalah tagar dengan tujuan yang sama, namun yang membedakan adalah tagar ini mengundang pada setiap perempuan-perempuan yang datang dari negara lain dan mengunjungi Iran untuk mendukung gerakan ini dengan tidak mengindahkan aturan berhijab yang diberitahukan hingga ikut serta dalam aksi protes menentang kewajiban hijab dengan melakukan swafoto dan mengirimnya pada laman Facebook *My Stealthy Freedom*. Jelasnya seperti pada tulisan Gi Yeon Koo yang mengatakan

“We are calling on all female tourists visiting Iran to come and support the refusal of stewardesses working for Air France to wear the veil on flights once they are in Iran. We are also asking them to support the My Stealthy Freedom Campaign. As a sign of support, here is what you can do: when you visit our beautiful Iran, you can take a photo without the compulsory headscarf as a sign of protest and send it to this campaign. On this Facebook page, you will see lots of such photos taken by Iranian women inside Iran. Please be as brave as them and say no to discriminatory law. Women must have the right to choose how they dress (Koo, 2016).

Aktivisme gerakan ini sangat berpengaruh besar pada aksi perlawanan perempuan terhadap adanya hukum diskriminatif yang ada. Dilansir dari Brookings, pemerintah pun mengakui bahwa ada koneksi yang jelas yang ditimbulkan gerakan ini (Suzanne & Eiora, 2019). Akibatnya sampai sekarang pun aksi protes masih terus ada. Mulai dari Viva Movahed yang mengibarkan hijabnya layaknya bendera di Enghab Street pada 2017 hingga meninggalnya Sahed Khodayari atau yang dikenal dengan julukan Blue Girl pada Oktober 2019 kemarin. Khodayari meninggal dengan cara membakar dirinya karena ketakutan akan sanksi pengadilan akibat perilakunya yang menyamar sebagai seorang laki-laki demi bisa masuk ke stadion sepakbola untuk menonton pertandingan (BBC News, 2019).

Gerakan yang berasal dari kampanye ini sangat bertumpu pada peran media sosial seperti Facebook dan sekarang merambah pada ranah Instagram pribadinya. Mengudaranya gerakan ini tak lepas dari peran besar Masih Alinejad selaku sang penemu. Dimana Alinejad adalah sosok yang dikenal vokal dalam menyuarakan kebebasan berhijab di Iran. Sebagai pengelola laman *My Stealthy Freedom* sudah ribuan foto dan video yang ia bagikan entah itu bentuk aksi protes para perempuan hingga tindakan sewenang-wenang polisi moral yang kasar terhadap perempuan. Melalui kampanye ini ingin menunjukkan pada dunia mengenai keadaan Iran yang benar-benar terjadi di Iran, mengenai bagaimana koersifnya rezim.

Keberadaan media sosial baik Facebook maupun Instagram menjadi elemen penting dalam gerakan pembebasan di Iran. Melalui media ini lah gerakan ini membentuk opini publik, melaukan penyebaran informasi terhadap kondisi Iran, bahkan hingga berhasil membuat hijab menjadi diskursus dalam tatanan global (Koo, 2016). Media sosial menjadi kunci dalam gerakan kesetaraan gender di Iran bahkan dalam gerakan pembebasan ataupun demonstrasi lain dikawasan Timur Tengah seperti pada Revolusi Mesir dengan adanya akun *We are all Khalid Said* yang berisi foto-foto dan kritikan terhadap kediktatoran rezim Husni Mubraok hingga pada konflik Syiria yang menyiarkan kekejaman rezim Ashaad (Amalia, 2016). Kehadiran internet dengan segala implikasinya sangat berguna sebagai alat kampanye dalam menyuarakan tuntutan, terlebih dalam *My Stealthy Freedom* yang fokus pada isu hijab tapi juga berkembang untuk menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan dasar hak asasi manusia (Koo, 2016). Kampanye online garapan Masih Alinejad ini berhasil menggunakan media sosial menjadi wadah kosmopolitanisme yang menjadi salah satu kunci dari gerakan sosial berbasis gender.

Tidak hanya bertumpu pada internet, kampanye kebebasan berhijab ini juga dinilai sebagai kampanye yang inovatif, pasalnya sang penggagas juga menyuarakan tuntutannya lewat buku yang ia tulis yang berjudul *“The Wind in My Hair: My Fight for Freedom in Modern Iran”*. Suatu buku yang menceritakan bagaimana keadaan dan konstruk perempuan dibangun di Iran bahwa perempuan adalah mereka yang berperilaku lemah lembut, makhluk yang patuh, dan tidak boleh menyimpang dari kodrati (Moorhead, 2018). Sepertiga buku ini mengisahkan kehidupan Masih Alinejad dari perjuangan menentang keganjilan-keganjilan yang ada, kemiskinan, hingga tekanan politik. Buku ini menjelaskan konteks hijab di Iran dari konteks kewajiban untuk menggunakannya hingga menjadikannya bahasan transnasional soal dihapuskan atau tetap adanya aturan tersebut (Zakaria, 2018).

My Stealthy Freedom memang gerakan tadinya gerakan kecil yang berasal dari Iran dan menuntut terjadinya perubahan di Iran pula. Namun hingga kini gerakan ini keberadaanya tidak bisa dinafikan, terlebih soal tuntutan utamanya pada kebebasan berkspresi yaitu kebebasan berhijab. Gerakan ini telah menuai banyak atensi dari elemen global baik dari media, INGO, hingga penghargaan yang didapat. Pada media misalnya sudah tidak terhitung media-media dunia mengabarkan isu ini entah itu Guardian, Duestce Welle, The New York Times, Washington Post, BBC, CNN, dan media-media lain. Sedang dari kelompok INGO, yang sampai saat ini masih menyuarakan isu ini adalah Amnesty

Internasional, suatu NGO yang fokus pada isu hak asasi manusia. Dimana Amnesty Internasional sampai saat ini masih mengkampanyekan kondisi perempuan ini dengan laporan-laporan yang disebarkannya, tidak hanya itu Amnesty juga sampai pada titik pemberian edukasi pada masyarakat terkait keadilan dan peran perempuan untuk membendung dominasi maskulinisme di Iran (Amnesty International, 2016). Eksistensi dari gerakan ini pun diakui salah satu buktinya pada diraihnya penghargaan oleh Masih Alinejad sebagai founder dari gerakan ini juga mendapat penghargaan pada *Geneva Human Right Summit* tahun 2015. Dalam laman Guardian dijelaskan bahwa penghargaan dianugerahkan karena “*giving voice to the voiceless and stirring the conscience of humanity to support the struggle of Iranian women for basic human rights, freedom, equality*” (Dehghan, 2015).

Eksistensi yang ada dari kampanye ini juga sampai pada tingkatan adanya respon dari pemerintah. Membuktikan bahwa gerakan ini mempunyai dampak dimasyarakat. Dimana setelah peristiwa ditangkapnya 29 perempuan akibat aksi penentangan terhadap hijab, Rouhani memerintahkan *Iranian Center for Strategic Studies* untuk mengadakan laporan 4 tahunan yang membahas soal bagaimana hijab diterapkan di Iran dan dengan ini menghasilkan survei bahwa hampir setengah dari perempuan Iran menolak dikte kebijakan ini (Suzanne & Eliora, 2019). Dari sini pula nama Rouhani dianggap lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya, ia dianggap sosok yang dapat mendengar tuntutan-tuntutan perempuan dan ini pula yang membuat dirinya diapresiasi (Mackintosh, 2018).

Bermula dari adanya niat baik penandatanganan Konvensi CEDAW adalah bukti yang dapat dilihat akan adanya suatu gerakan untuk membebaskan perempuan dari keterkungkungan yang ada. Dari sini, dari pemerintahan Khatami yang kemudian penulis anggap sebagai keran pembuka aliran gerakan kesetaraan gender yang mempengaruhi gerakan-gerakan dimasa selanjutnya. Jika penandatanganan Konvensi CEDAW ini sampai diajukan dua kali dalam dua periode pemerintahan Khatami yang berakhir hingga tahun 2005 dan sampai sekarang masih belum menemui jalan terang. Maka wacana kesetaraan gender yang menguap pun kemudian tidak serta merta mati seiring berakhirnya kepemimpinan Khatami. Gerakan-gerakan kesetaraan gender dimasa-masa sesudahnya justru menunjukkan peningkatan. Dan gerakan-gerakan ini keberadaan dan aktivitasnya langsung dimotori oleh perempuan-perempuan Iran tanpa ada afiliasi politik didalamnya. Gerakan yang ada hanya berfokus pada muara tuntutan yang serupa yaitu adanya kehidupan yang demokratis dan pemenuhan terhadap keberadaan hak asasi manusia.

Meningkatnya aktivitas gerakan kesetaraan gender terbukti dari adanya gerakan-gerakan yang sudah penulis jelaskan, yaitu *One Million Signatures* yang memiliki tuntutan untuk penghapusan terhadap produk hukum diskriminatif bagi perempuan di Iran dan *Green Movement* gerakan yang lahir karena peristiwa pemilihan presiden tahun 2009 yang memiliki tuntutan pada pemenuhan prinsip demokrasi seperti keterbukaan hasil pemilu, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hingga penegakan hukum yang adil. Dimana kedua aksi protes ini terjadi pada era kepresidenan Ahmadinejad yang dikenal sebagai tokoh fundamentalis dengan sederet kebijakan yang ketat. Aksi gerakan pembebasan perempuan lain yang masih berjalan hingga saat ini adalah kampanye *My Stealthy Freedom*. Suatu aksi protes yang menuntut adanya kebebasan dalam berhijab, yang bertolak dari adanya kebijakan yang mewajibkan hijab bagi perempuan di Iran apapun itu agamanya.

Ketiga bentuk gerakan yang lahir pasca kepemimpinan Khatami tersebut menjadi bukti adanya peningkatan aktivisme gerakan kesetaraan gender di Iran. Aksi-aksi yang pada awalnya hanya aksi kecil, dengan tuntutan yang terlihat sederhana bahkan terkesan tidak terlalu penting, namun pada akhirnya tetap bisa mempengaruhi bahkan menarik atensi dari dunia internasional, karena perjuangan dan keberanian perempuan dalam menyuarakan hak-hak dan tuntutan-tuntutan didalamnya. Bahkan sampai saat ini pun pembahasan mengenai hak dan kedudukan perempuan, feminisme, dan eksistensi ideologi Islam, juga kehadiran demokrasi masih menjadi diskursus yang panjang.

Persebaran paham feminisme dapat digambarkan terjadi karena adanya kesamaan perilaku yang dialami perempuan diberbagai belahan dunia yaitu ketidakadilan yang dialami perempuan baik itu karena praktik budaya misogini hingga undang-undang bias gender. Dengan ini feminisme sebagai sebuah paham hadir untuk bisa menghapuskan ketidakadilan tersebut. Sebagai paham yang sering dijuluki paham dari Barat, memang feminisme mengarah pada nilai-nilai barat seperti pada kebebasan dan penghargaan HAM.

Penelitian ini pun demikian bahwa pengaruh feminisme Barat terlihat dari adanya diskursus global yang dibawa terutama setelah adanya Konvensi CEDAW yang dicanangkan oleh PBB. Dari sinilah pentingnya penghargaan terhadap peran perempuan menjadi mengemuka, penting, dan wajib, terutama dimandatkan pada negara sebagai aktor yang dianggap memiliki kapasitas sentral dan dituntut dapat mengakhiri diskriminasi pada perempuan.

Keberlanjutan terhadap diskursus ini pun makin dikuatkan hingga kini dengan adanya point ke 5 dalam *Sustainable Development Goals*, suatu rencana pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB

dan mempunyai target akhir ditahun 2030 nanti. Dimana point ke-5 ini adalah “*achieve gender equality and empower all women and girls*” atau kesetaraan untuk memberdayakan kelompok perempuan. Namun sayangnya tidak semua negara mendatangi konvensi ini, seperti kasus Iran dalam penelitian ini yang selalu mengalami jalan terjal berupa kuatnya ulama fundamentalis yang menolak nilai-nilai konvensi ini.

Feminisme Barat tapi bukanlah soal produk CEDAW dan SDGS semata, tuntutan-tuntutan dan nafas yang digulirkan dari gerakan kesetaraan gender yang ada di Iran saat ditelisik akan mengarah pada nilai-nilai liberal yang sering dikonstruksi sebagai nilai Barat seperti pada kebebasan dan penekanan terhadap HAM. Nilai-nilai liberal ini ternyata memiliki kesesuaian dengan salah satu aliran feminisme yaitu feminisme liberal.

Feminisme liberal sendiri dalam buku Ani Soetjipto didefinisikan sebagai sebuah aliran feminis yang menganggap bahwa keadilan gender akan dapat dicapai apabila dihapuskannya hambatan yang bersifat regulatif yaitu yang terkait dengan hukum, yang menjadi pembeda hak antara laki-laki dan perempuan, setelah itu juga perlu integrasi gender yang adil pada perempuan (Soetjipto, 2013). Nur Azizah juga menjelaskan dalam bukunya menjelaskan perspektifnya bahwa dalam feminisme liberal kedudukan dan peran perempuan dapat tersubordinat karena ketimpangan hak dan peluang dimasyarakat, maka dengan ini sangat perlu adanya persamaan hak diantara kedua jenis kelamin tersebut dalam suatu negara, mengingat negara adalah cermin dari pluralitas politik (Azizah, 2017).

Gerakan-gerakan kesetaraan gender di Iran yang mempunyai tuntutan seperti penghapusan hukum diskriminatif, pemenuhan prinsip demokrasi dan HAM dan nafas yang mengusung nilai-nilai kebebasan ini sungguh jelas kesamaannya dengan prinsip feminisme liberal yaitu menghapuskan domestifikasi dan hambatan-hambatan regulative yang ada pada keberadaan perempuan untuk mencapai akses dan hak yang sama.

Praktik-praktik pembebasan yang digelorkan sampai saat ini menunjukkan bahwa eksistensi dan fungsi sistem *Velayet el- Faqeh* mulai terkikis. Melihat hal tersebut penulis kemudian menemui alasan mengapa masyarakat semakin menjauhi ideologi tersebut diantaranya seperti kesenjangan antar generasi setelah revolusi berlangsung, imbas dari perubahan konstelasi politik pasca perang dingin, sulitnya penerapan ideologi Islam, ketidaknyamanan terhadap ideologi Islam, pengambilan keputusan yang tidak melibatkan dan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, peran ulama yang terlalu luas, hingga penyesalan akan terjadinya Revolusi Besar 1979 (Fahrudin, 2007) (Reza, 2017).

Penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan adalah bukti bahwa sampai saat ini perempuan di Iran masih menganggap adanya perilaku diskriminatif, bahkan pembedaan dari perilaku ini dilegalisasi oleh negara dan dijalankan oleh kelompok ulama fundamentalis. Perempuan Iran sampai saat ini masih berjuang untuk bisa mendapatkan keadilan versi mereka. Meskipun sampai saat ini keberadaan mengenai tuntutan-tuntutan dan aktivisme-aktivisme perempuan di Iran masih mengalami perdebatan. Namun pengaruh feminisme dalam tubuh Iran adalah hal yang nyata adanya. Penulis disini menganggap ini adalah feminisme Barat terkhusus pada aliran feminisme liberal, tapi penulis juga tidak menutup perbedaan pemikiran yang lain. Karena pada hakikatnya sampai saat ini kajian menyoal feminisme dan Hubungan Internasional adalah kajian yang maha luas, dinamis, dan terus tumbuh, bahkan para peneliti pun belum memiliki kesepakatan atas konsep dasar dan konsekuensi yang timbul dari adanya pemahaman ini (Soetjipto, 2013).

Penjabaran dua argumen penulisan yang ada, jika diperdalam pada intinya akan bermuara pada adanya keinginan besar untuk membuat bahasan mengenai gender terkhusus pada peran, kedudukan, dan hak perempuan menjadi bahasan yang umum dan dapat diterima masyarakat. Mengingat keadaan perempuan di Iran yang sampai saat ini masih dianggap menjadi warga negara kelas dua. Gerakan-gerakan kesetaraan gender yang ada yaitu gerakan yang mengupayakan adanya perubahan pada perempuan berusaha mengarusutamakan isu ini untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pengakuan pada hak dan peran perempuan, akan pentingnya keadilan yang harus diterima oleh semua warganegara.

Teori *gender mainstreaming* seperti yang sudah dikemukakan menjelaskan soal proses atau langkah untuk mencapai kesetaraan gender bukan menjelaskan soal hasil. Proses *gender mainstreaming* ini yang kemudian dilihat penulis justru datang dari gerakan-gerakan kesetaraan ini, bukan datang dari pemerintah. Mengingat didalam pemerintah terlalu banyak aktor dan kepentingan. Keinginan terbesar dari gerakan ini adalah kehidupan Iran yang demokratis dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Gerakan-gerakan ini adalah input berupa *demand* yang diajukan pada rezim untuk bagaimana caranya bisa mengintegrasikan gender secara adil dalam mendukung pembangunan suatu bangsa.

Aktivitas yang sedari dulu ditunjukkan gerakan-gerakan pembebasan perempuan di Iran dalam kurun waktu tiga dekade terakhir sekaligus menjadi aktor utama dalam proses demokratisasi dalam bidang sosial,

politik, budaya di Iran, menunjukkan bagaimana besarnya minat masyarakat akan kehidupan yang lebih demokratis (Birgani, 2010). Pertumbuhan gerakan-gerakan perempuan di Iran sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik yang ada mulai dari yang reformis hingga neo-konservatif, yang menjadikan bukti bahwa gerakan-gerakan tersebut juga mempunyai aspek erat dengan ideologi politik yang ada di tiap-tiap masanya (Kamaluddin, 2011). Dari sini penulis berpikir untuk pentingnya menaruh bagaimana perkembangan di tiap kepemimpinan presiden, mengingat bahwa presiden mempunyai kapabilitas untuk bisa menciptakan suatu tatanan sosial bahkan pendorong motor perubahan. Gerakan perempuan di Iran sekaligus juga menjadi gerakan terpanjang dan paling bertahan untuk menuntut adanya perubahan di Republik Islam Iran. Akibat besarnya peran perempuan dalam perubahan yang terjadi di Iran maka tak heran jika perempuan diklasifikasikan sebagai komponen demokrasi bersama para intelektual dan mahasiswa (Cipto, 2004).

KESIMPULAN

Republik Islam Iran adalah negara dengan historis yang panjang mulai dari Revolusi Besar 1979 hingga soal label negara fundamentalis yang didapatnya. Negeri para *mullah* dengan sistem pemerintahan khasnya yaitu *Velayet el-Faqeh* atau kepemimpinan para ulama ini satu-satunya negara yang merupakan sintesa dari ajaran Syiah Imam Dua Belas. Dari kepemimpinan dan dominasi ulama yang kuat dan luas ini kemudian membuat gejolak dan menimbulkan perlawanan didalam negeri *mullah* ini sendiri. Ulama-ulama yang ada dianggap terlalu mencampuri seluruh hal. Menjadi hal yang problematik untuk diteliti kemudian, karena eksistensi ulama yang ada adalah sintesa dari prinsip-prinsip Imamah ajaran Syiah Imam Kedua Belas, yang artinya keberadaan ulama sebagai penerus kenabian yang bertujuan untuk kemashalahatan umat tidak bisa ditentang keberadaan dan keputusannya. Melalui ini pula dapat diperjelas bahwa apapun yang dilakukan ulama harus ditaati karena keputusan dari ulama adalah keputusan perwakilan dari sang ilahi.

Kepemimpinan ulama ini tapi nyatanya tidak menjadi jaminan akan adanya keadilan pada rakyat. Ulama-ulama yang ada justru malah menimbulkan praktik hubungan yang asimetris dimasyarakat. Seperti pada penafsiran sepihak teks-teks agama terutama menyoal bagaimana kedudukan dan peran perempuan, karena dalam ajaran Syiah ulama-ulama memang mempunyai wewenang tersebut. Selain itu posisi ulama yang didominasi laki-laki menimbulkan perdebatan tersendiri, akan bagaimana bisa adilnya hukum yang ada jika dalam proses perumusan kebijakan yang ada diisi oleh kaum laki-laki yang tidak bisa mengerti keadaan

dan hak perempuan. Bias gender pun dapat dilihat makin terang, mulai dari tafsir dan konstruk sepihak ulama-ulama kemudian proses pembuatan produk hukum yang bias gender, hingga akhirnya lahir kebijakan yang diskriminatif pada perempuan seperti presiden hanya untuk kaum laki-laki, hak asuh anak, kewajiban berhijab, pernikahan dan perceraian, pernikahan anak, segregasi diranah publik, hak bekerja. Dari contoh kebijakan-kebijakan yang dijelaskan tersebut membenarkan perbedaan terhadap perempuan adalah benar terjadi. Perempuan sampai saat ini masih menjadi warganegara kelas dua, masih menjadi makhluk yang tidak diuntungkan. Negara dalam hal ini sebagai institusi politik yang bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pada warganegaranya justru malah melanggengkan praktik ketimpangan yang ada.

Pada penelitian skripsi ini penulis menemukan adanya pengaruh feminisme Barat yaitu feminisme liberal didalam tubuh Iran. Feminisme liberal memandang bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memiliki posisi sederajat. Dalam mendukung pandangan tersebut aliran feminis ini berpendapat harus dihapuskannya aturan-aturan ataupun kebijakan ataupun produk hukum yang menghambat akses perempuan untuk maju dan berperan diranah publik. Dapat dilihat dari sini bahwa paham Barat tidak selamanya buruk, ajaran feminis justru membuka tabir kebebasan dan keadilan pada kaum perempuan yang kerap disubordinasikan diberbagai macam kebudayaan dunia. Dengan ini sekaligus juga menjadi bukti bahwa sekuat apapun pemerintah membendung pengaruh paham atau nilai-nilai Barat, pada kenyataannya paham Barat tetap mendapatkan hati dan bahkan menjadi motor penggerak perubahan dimasyarakat.

Aliran feminisme liberal mendapatkan tempat dihati masyarakat Iran, ini dapat dibuktikan penulis dari adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender yang ada. Dimana gerakan-gerakan tersebut memiliki nafas dan tujuan yang serupa dengan feminisme liberal. Diawali dari upaya penandatanganan Konvensi CEDAW dibawah kepemimpinan Khatami yang menjadikan bukti adanya keseriusan rezim untuk menangani penghapusan diskriminasi pada perempuan. Kemudian adanya dua gerakan pembebasan pada era Ahmadinejad yaitu kampanye *One Million Signature* yang menuntut untuk penghapusan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan demonstrasi besar *Green Movement* dengan tuntutan demokratisasi, dimana perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dan menciptakan citra damai. Demonstrasi ini tersebut juga digadang-gadang menjadi demonstrasi terbesar setelah adanya demonstrasi pada 1979. Terakhir adalah adanya kampanye *My Stealthy Freedom*

yang masih berjalan hingga saat ini, suatu kampanye yang menuntut aturan kewajiban hijab pada perempuan, fokus kampanye ini adalah pada kebebasan berhijab dimana penggunaan hijab disini dipandang sebagai bentuk ketulusan bukan paksaan.

Menggunakan teori *Gender Mainstreaming* sebagai kacamata dalam memandang sebuah fenomena, penulis berusaha menjelaskan riset ini. Teori ini adalah teori yang menjelaskan tentang langkah atau proses untuk menuju pada kesetaraan gender bukan menjelaskan soal hasil. Teori *Gender Mainstreaming* bermuara pada pentingnya integrasi gender yang ada di sebuah negara. Dengan teori ini bahasan mengenai kesetaraan gender menjadi hal yang penting, soal bagaimana negara menjalankan perannya dan bagaimana bahasan mengenai gender menjadi bahasan yang diurusutamakan. Berdasar teori tersebut gerakan-gerakan kesetaraan gender yang berusaha dijelaskan oleh peneliti memiliki peran besar terhadap perkembangan isu gender di Iran. Dimana proses *gender mainstreaming* justru dilakukan oleh gerakan yang mengusahakan agar bahasan gender menjadi suatu bahasan yang umum dan diterima di Iran. Negara gagal dalam melakukan proses *gender mainstreaming* mengingat banyaknya kepentingan dan singgungan antar aktor didalamnya terutama dari kelompok ulama fundamentalis. Dari adanya gerakan-gerakan tersebut pula juga menunjukkan mengenai *demand* yang diberikan pada rezim untuk menuju kehidupan yang lebih demokratis.

Adanya upaya yang dilakukan oleh gerakan-gerakan tersebut menjadi bukti masih adanya praktik budaya patriarki. Feminisme sebagai sebuah paham berusaha hadir untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut. Bahasan feminisme sendiri adalah bahasan kontemporer yang menarik untuk dikaji dalam studi Hubungan Internasional yang membuktikan bahwa studi ini bukan hanya menyoal isu *high-politics* semata. Isu emansipasi perempuan dan kesetaraan gender juga menjadi bagian dari studi ini. Hal ini dapat dibuktikan dari bahasan mengenai kesetaraan gender yang menjadi diskursus global. Bukti sudahnya kajian gender menjadi diskursus global dapat dilihat dari adanya Konvensi CEDAW, suatu konvensi yang mengandung arti penting untuk penghapusan perilaku diskriminasi pada perempuan. Tidak hanya itu, kesetaraan gender makin diperkuat dengan dirumuskannya poin ke-5 yaitu Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dari dua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sampai sekarang berbagai institusi atau kelompok diberbagai belahan dunia memandang kesetaraan gender menjadi suatu bahasan penting. Mengingat perempuan juga memiliki hak, perempuan

juga subjek dalam hak asasi manusia, dan ikut andil dalam pembangunan bangsa juga merupakan hak seluruh warganegara.

Berdasar usaha eksplorasi pembahasan yang berusaha dijelaskan, penulis dengan ini masih mengakui adanya keterbatasan dalam penelitian skripsi ini. Keterbatasan ini karena penulis hanya menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data, dimana tak jarang ditemui perbedaan dan kurangnya informasi yang terdapat dalam sumber bacaan yang digunakan. Adapun untuk agenda riset selanjutnya penulis mengharapkan adanya data primer. Penulis juga mendorong kepada peneliti selanjutnya agar bahasan mengenai Islam dan feminisme di Iran dapat terus dikaji. Dikatakan demikian karena sampai saat ini bahasan mengenai kehadiran feminisme di Iran yang dihadapkan dengan sistem pemerintahan *Velayat el-Faqeh* masih menjadi perdebatan yang panjang.

REFERRENSI

- Aengenvoort, J. (2014, Mei 28). *No Hijab: An Iranian Journalist Offers Women A Stealthy Freedom On Facebook*. Dipetik Desember 12, 2019, dari Deutsch Welle: <https://www.dw.com/en/no-hijab-an-iranian-journalist-offers-women-a-stealthy-freedom-on-facebook/a-17666248>
- Amalia, N. R. (2016). Propoganda Media Sosial Facebook dan Blog dalam Berkembangnya Konflik di Suriah dan Mesir 2011-2013. *Journal of Communication Ettisal, Vol.1, No.1, 24-38*.
- Amnesty International. (2016, Agustus 2010). *Iran: Women's rights activists treated as 'enemies of the state' in renewed crackdown*. Diambil kembali dari Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/iran-womens-rights-activists-treated-as-enemies-of-the-state-in-renewed-crackdown/>
- Amnesty International. (2019, Mei 28). *Iran: Abusive force veiling laws police women's lives*. Diambil kembali dari Amnesty International: <http://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/05/iran-abusive-forced-veiling-laws-police-womens-lives/>
- Argenti, G. (2018). Kelompok Post Islamisme Pasca Revolusi Islam Iran 1979. *Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.3, No.1, 139-150*.
- Aulawi, M. B. (2008). *Konsistensi Khatami Menjalankan Demokrasi di Iran Tahun 1997-2005*. Yogyakarta.
- Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik (Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis)*. Yogyakarta: The Phinis Press.
- Bajoghli, N. (2016, Maret 2). *How women, the Green Movement and an app shaped Iran's elections*. Dipetik Oktober 17, 2019, dari The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/01/how-women-the-green-movement-and-an-app-shaped-irans-elections/>
- Bakar, F. (2019, April 23). *Women are wearing white on Wednesday to protest Iran's strict hijab laws*. Dipetik Desember 16, 2019, dari Metro: <https://metro.co.uk/2019/04/23/women-are-wearing->

- white-on-wednesday-to-protest-irans-strict-hijab-laws-9286149/
- Bakhshizadeh, M. (2018). Women's Rights in Iran and CEDAW: a Comparison. Dalam M. Bakhshizadeh, *Changing Gender Norms in Islam Between Reason and Revelation* (hal. 61-99). Budrich UniPress.
- BBC News. (2019, September 22). *Fifa 'assured' Iranian women will be able to attend football matches*. Dipetik Oktober 10, 2019, dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49787863>
- Birgani, V. T. (2010). Green Women of Iran: The Role of the Women's Movement During and after Iran's Presidential Election. *Journal of Constellations, Vol. 17, No. 1*, 79-86.
- Brenner, A. (2009). GAD and Gender Mainstreaming: A Pathway to Sustainable Development? *Journal of Consilience, No.2*, 1-22.
- Cipto, B. (2004). *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi, dan Fenomena Khatami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Company, L. B. (Sutradara). (2018). *The Wind in My Hair by Masih Alinejad* [Gambar Hidup].
- Dabashi, H. (2013, Juni 12). *What happened to the Green Movement in Iran?* Dipetik Desember 13, 2019, dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/05/201351661225981675.html>
- Dehghan, S. K. (2015, Februari 24). *Iranian woman wins rights award for hijab campaign*. Dipetik Desember 17, 2019, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/24/iranian-woman-wins-rights-award-hijab-campaign>
- Fathi, N. (2009, Juni 22). *In a Death Seen Around the World, a Symbol of Iranian Protests*. Dipetik Desember 2019, 13, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2009/06/23/world/middleeast/23neda.html>
- Hadiwinata, B. S. (2007). Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme. Dalam Y. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional* (hal. 1-24). Bandung: Graha Ilmu.
- Hatam, N. (2017, June 14). *Why Iranian Women are Wearing White in Wednesday*. Dipetik Desember 10, 2019, dari BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40218711>
- Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Komunikasi Massa, Vol.1, No. 1*, 18-24.
- HI UGM (Sutradara). (2019). *Merawat Pertanyaan-Pertanyaan* [Gambar Hidup].
- Justice for Iran. (2014). *Thirty-five Years of Forced Hijab: The Widespread and Systematic Violation of Women Right's in Iran*. Justice for Iran.
- Kamaluddin, M. (2011). *Gerakan Perempuan di Republik Islam Iran Pasca Revolusi 1979*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh.
- Koo, G. Y. (2016). To be Myself and have *My Stealthy Freedom*: The Iranian Women's Engagement with Social Media. *Revista de Estudios Internacionales Mediteraneos, No.21*, 142-157.
- Kurniadi, D. (2011). *Perbandingan Eksistensi Wilayah Al-Faqih Pada Masa Kepemimpinan Mohammad Khatami Dengan Mahmoud Ahmadinejad*. Yogyakarta.
- Mackintosh, E. (2018, Februari 6). *Iran report: 49% are against compulsory veils*. Diambil kembali dari CNN: <https://edition.cnn.com/2018/02/05/middleeast/iran-hijab-law-report-intl/index.html>
- Mahmood, F. (2016, April 20). *Rouhani clashes with Iranian police over undercover hijab agents*. Dipetik September 2018, 23, dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-iran-rights-rouhani/rouhani-clashes-with-iranian-police-over-undercover-hijab-agents-idUSKCN0XH0WH>
- Maksum, I. (2014). Konsep M. Fethullah Gulen Tentang Hermeneutika Peradaban Islam Kosmpolitan. *Jurnal Epitesme, Vol.9, No.1*, 205-222.
- Maria Ulfa, A. S. (2013). Gambaran Rezim Nazi Dalam Peradaban Jerman Dalam Beberapa Puisi Pilihan Sylvia Plath. *Jurnal Publika Budaya, Volume 1, No.1*, 47-52.
- McMahon, A., & Mackander, M. (2016, Agustus 3). *#MenInHijab: Iranian men don headscarf to challenge strict veil law*. Dipetik Desember 2017, 2019, dari ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2016-08-03/women-share-photos-of-men-in-hijabs-to-protest-iran-veil-law/7677084>
- Mikail, K. (2013). Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Revolusi 1979). *Jurnal Tamaddun, Vol.13, No.2*.
- Moorhead, J. (2018, Juni 3). *The wind in my hair: one Iranian woman's courageous struggle against being forced to wear the hijab*. Dipetik Januari 8, 2020, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/global/2018/jun/03/the-wind-in-my-hair-one-womans-struggle-against-being-forced-to-wear-hijab>
- Prayugo, A. Y. (2005). *Dinamika Pandangan Masyarakat Iran Terhadap Budaya Barat*. Yogyakarta.
- RadioFreeEuropeRadioLiberty. (2009, November 13). *Iran's One Million Signatures Campaign Recognized As 'Women Of The Year'*. Dipetik Desember 7, 2019, dari RadioFreeEuropeRadioLiberty: https://www.rferl.org/a/Irans_One_Million_Signatures_Campaign_Recognized_As_Women_Of_The_Year/1877634.html
- Reza, A. K. (2017). Menakar Ideologi Republik Islam Iran: Kontestasi Antara Ideologi dan Pragmatisme Dalam Politik. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Daulah, Vol.7, No.2*, 280-301.
- Ridho, M. Z. (2016). Iran: Negara dan Masuknya Hirarkhi Agama. *Jurnal Hukum dan Politika al Qisthas, Vol.7, No.1*, 37-49.
- Robert Jackson, G. S. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. New York: Oxford University Press.
- Sameh, C. (2014). From Tehran to Los Angeles to Tehran: Transnational Solidarity Politics in the One Million Signatures Campaign to End Dsicriminatory Law. *Journal of Women's Studies Quarterly*, 166-188.
- Sams, S. (2019, Juni 14). *Iran's Green Movement: Why US policies strengthen the regime*. Dipetik Desember 2019, 28, dari Deutsch Welle: <https://www.dw.com/en/irans-green-movement-why-us-policies-strengthen-the-regime/a-49189323>
- Saul, H. (2016, Juli 28). *Men in Iran are wearing hijabs in solidarity with their wives who are forced to cover their hair*. Dipetik Desember 17, 2019, dari Independent: <https://www.independent.co.uk/news/people/men-in-iran-are-wearing-hijabs-in-solidarity-with-their-wives-a7160146.html>
- Sedighi, G. (2009). *The Struggle for Gender Equality within An Iranian Islamic Framework: The Case of One Million Signatures Campaign*. Bergen: Bergen Open Research Archive (BORA) .

- Shilawati, S. (2013). Konvensi Perempuan: Sebuah Peluang Menggugat Ketidakadilan Berbasis Gender di Iran. Dalam A. Soetjipto, & P. Trimayuni, *Gender & Hubungan Internasional Sebuah Pengantar* (hal. 258-289). Yogyakarta: Jala Sutra.
- Shofiyah, A. (2019). *Dinamika Gerakan Sosial Perempuan Iran (Pra dan Pasca Revolusi 1979)*. Surabaya: DigitalLibrary UIN Sunan Ampel.
- Soetjipto, A. (2013). Pendahuluan: Gender, Feminisme, dan Hubungan Internasional. In A. Soetjipto, & P. Trimayuni, *Gender dan Hubungan Internasional Sebuah Pengantar* (pp. 1-31). Yogyakarta: Jelasutra.
- Suzanne, M., & Eliora, K. (2019, Januari 24). *Iran and the headscarf protest*. Dipetik Desember 25, 2019, dari Brookings: <https://www.brookings.edu/opinions/iran-and-the-headscarf-protests/>
- True, J., & Minitrom, M. (2001). Transnational Network and Policy Diffusion: The Case of Gendermainstreaming. *Journal of International Studies Quarterly*, Vol.45, No. 1, 27-57.
- UN Women National Committee Australia. (t.thn.). *Fact Sheet Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Dipetik Desember 22, 2019, dari UN Women National Committee Australia: www.unwomen.org.au
- United Nations High Commissioner for Human Rights. (2018). *Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2018*.
- Usman. (2017). Ulama Dalam Konstitusi Negara Imamah. *Jurnal Islamuna*, Vol.4, No. 1, 209-231.
- Vijaya, K. (2014). Gender Mainstreaming and Human Resource Development. *Proceeding of The Indian History Congress*, Vol.75 (hal. 1224-1231). Indian History Congress.
- Voanews.com. (2009, Desember 2011). *Iranian Women Campaign to End Discriminatory Laws against Them*. Dipetik Desember 6, 2019, dari Voanews.com: <https://www.voanews.com/archive/iranian-women-campaign-end-discriminatory-laws-against-them>
- Wirasenjaya, A. M. (2012). Keluar Dari "Teks Besar" Gagasan Post-Positivis Dalam Studi Hubungan Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 1, 64-69.
- Yuliani. (2010). *Faktor-faktor Kemenangan Kembali Mahmoud Ahmadinejad Dalam Pemilihan Umum Presiden Iran Tahun 2009*. Yogyakarta.
- Zakaria, R. (2018, Juli 3). *The Women Whose Hair Frightens Iran*. Dipetik Januari 10, 2020, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2018/07/03/books/review/masih-alinejad-wind-in-my-hair.html>